

BAB III

INKLUSIVISME BERAGAMA PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID

A. Inklusivisme Beragama Perspektif Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, sebagai seorang cendekiawan Muslim dan pemikir Islam, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan inklusivisme dalam agama. Perspektif inklusivisme yang dikembangkannya memiliki beberapa komponen utama yang akan dianalisis secara rinci dalam bab ini.

Perspektif inklusivisme Nurcholish Madjid didasarkan pada pendekatan universalitas agama. Ia meyakini bahwa agama-agama memiliki tujuan yang sama dalam mempromosikan kasih sayang, keadilan, kebaikan, dan perdamaian di dunia.⁹³ Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan ekspresi agama-agama, nilai-nilai dasar yang bersama-sama diemban oleh semua agama adalah persamaan yang harus diakui. Madjid berpendapat bahwa inklusivisme bukanlah tentang mengaburkan perbedaan agama atau mereduksi agama-agama menjadi satu, tetapi tentang menghargai perbedaan dan mencari persamaan-nilai di antara mereka. Ia mengajak umat beragama untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Dalam perspektif Madjid, universalitas agama menuntut pemeluk agama untuk melampaui batasan kelompok mereka sendiri dan berkomunikasi dengan pemeluk agama lain. Ia percaya bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang

⁹³Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), 45-50.

agama-agama lain akan membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa saling pengertian dan kerjasama antarumat beragama.

Madjid mengakui adanya tantangan dalam menghadapi pluralitas dalam agama. Ia menyadari bahwa perbedaan keyakinan dan praktik agama dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan. Namun, ia berpendapat bahwa pluralitas agama harus dilihat sebagai suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan pemahaman dan dialog yang baik.⁹⁴

Perspektif Madjid menekankan pentingnya mengatasi prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang mungkin timbul akibat pluralitas agama. Ia mengajak umat beragama untuk menghargai keberagaman sebagai karunia Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam kehidupan beragama. Madjid berpendapat bahwa penolakan terhadap keberagaman agama adalah tanda intoleransi dan kebodohan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, inklusivisme dalam agama menuntut umat beragama untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip inklusif, seperti toleransi, saling menghormati, kerjasama, dan dialog. Madjid memandang inklusivisme sebagai jalan untuk mengatasi ketegangan antaragama dan membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat yang plural.⁹⁵

Salah satu pendekatan utama yang digunakan oleh Madjid dalam mempromosikan inklusivisme dalam agama adalah melalui dialog antaragama. Ia menganggap dialog sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat pemahaman

⁹⁴Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994), 112.

⁹⁵Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Mizan, 1996), 89.

saling pengertian, mengatasi prasangka dan stereotip, serta membangun kerjasama yang konstruktif antara pemeluk agama yang berbeda.⁹⁶

Perspektif Madjid tentang dialog antaragama melibatkan kesediaan untuk mendengarkan dan belajar dari pemeluk agama lain. Ia berpendapat bahwa dialog yang dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati akan membantu memperluas wawasan dan menciptakan ikatan antarumat beragama. Melalui dialog, pemeluk agama dapat saling memahami dan membangun kesadaran tentang nilai-nilai bersama yang diemban oleh agama-agama.⁹⁷ Madjid juga menekankan pentingnya dialog antaragama dalam mengatasi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama. Ia percaya bahwa dialog yang baik dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan kerukunan antaragama dalam masyarakat.

Madjid melihat pendidikan agama sebagai sarana penting dalam mempromosikan inklusivisme. Ia berpendapat bahwa pendidikan agama harus mengajarkan nilai-nilai universal agama-agama dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan agama secara obyektif dan kritis. Perspektif Madjid tentang pendidikan agama mencakup pemahaman tentang pluralitas agama, pemikiran kritis, pemahaman kontekstual, dan penguatan kapasitas untuk menghargai perbedaan. Ia meyakini bahwa melalui pendidikan agama yang inklusif, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas, toleran,

⁹⁶Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial-Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), 56.

⁹⁷Zaprul Khan, "Dialog dan Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *Mawa'izah: Jurnal dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9, no. 2 (December 20, 2018): 154–77, <https://doi.org/10.32923/maw.v9i2.783>.

dan inklusif terhadap agama-agama lain.⁹⁸ Madjid menekankan pentingnya pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma dan ritual, tetapi juga memperkuat pemahaman inklusifisme, kerjasama antaragama, dan pemikiran kritis. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang inklusif dapat membantu mengatasi prasangka dan konflik yang berakar dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang agama-agama lain.⁹⁹

Nurcholish Madjid juga memberikan kontribusi dalam pemikiran kritis terhadap ekstremisme dalam agama. Ia secara tegas menolak pendekatan sempit dan intoleran yang seringkali menyebabkan konflik dan kekerasan. Madjid berpendapat bahwa ekstremisme tidak sesuai dengan esensi ajaran Islam yang inklusif dan rahmatan lil alamin.¹⁰⁰ Perspektif Madjid tentang inklusivisme mengajak umat beragama untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama mereka, dan tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman sempit dan radikal. Ia mendorong umat beragama untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusivisme dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi pemikiran yang mengkotak-kotakkan agama dan memicu konflik.¹⁰¹

Perspektif Madjid tentang inklusivisme juga mencakup pengakuan akan keberagaman budaya sebagai bagian integral dari agama. Ia meyakini bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya tempatnya berkembang. Oleh karena itu, dalam mempromosikan inklusivisme dalam agama, Madjid mengajak untuk

⁹⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos, 1999), 72.

⁹⁹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), 134.

¹⁰⁰Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 63.

¹⁰¹Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1999), 210.

menghargai dan memahami keberagaman budaya yang melingkupi agama-agama tersebut. Dalam perspektif Madjid, inklusivisme melibatkan penghormatan terhadap praktik keagamaan yang berbeda, termasuk tradisi, ritus, dan bahasa yang digunakan dalam konteks budaya tertentu. Ia meyakini bahwa agama harus mampu menyerap nilai-nilai positif dari budaya tempatnya berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal agama.¹⁰²

Perspektif Madjid tentang inklusivisme juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai implementasi dari nilai-nilai inklusif dalam agama. Ia berpendapat bahwa inklusivisme dalam agama harus mencakup upaya untuk memperjuangkan keadilan dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa memandang agama, ras, atau kelompok sosial.¹⁰³ Madjid melihat pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sebagai tanggung jawab agama dan umat beragama. Dalam perspektifnya, inklusivisme tidak hanya berbicara tentang kerukunan antaragama, tetapi juga tentang kesetaraan dalam perlakuan dan peluang bagi semua anggota masyarakat.¹⁰⁴

Perspektif inklusivisme Nurcholish Madjid juga mencakup pentingnya mempertahankan identitas agama dalam konteks inklusivisme. Ia berpendapat bahwa inklusivisme tidak mengharuskan pemeluk agama untuk mengorbankan atau menghilangkan identitas agama mereka. Sebaliknya, inklusivisme memperkaya pemahaman dan praktik agama dengan mempromosikan dialog dan saling

¹⁰²Catherine Kohler Riessman, *Narrative Methods for the Human Sciences* (SAGE, 2008).

¹⁰³Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), 88.

¹⁰⁴Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 45 (sebagai referensi pendukung).

pengertian antaragama.¹⁰⁵ Madjid menekankan pentingnya memahami dan memperkuat identitas agama masing-masing, sambil tetap terbuka untuk belajar dari agama-agama lain. Ia meyakini bahwa pemeluk agama yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama mereka akan lebih mampu berkontribusi dalam dialog dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam antaragama.

Dalam perspektif Madjid, pemimpin agama memiliki peran penting dalam mempromosikan inklusivisme. Ia berpendapat bahwa pemimpin agama harus menjadi contoh yang baik dalam menghargai perbedaan dan memperjuangkan kerukunan antaragama. Pemimpin agama juga diharapkan memfasilitasi dialog antaragama dan menciptakan ruang untuk pertemuan dan diskusi antarumat beragama.¹⁰⁶ Madjid mendorong pemimpin agama untuk membentuk jaringan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dengan pemimpin agama dari agama-agama lain. Ia percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat suara inklusivisme dan memberikan contoh nyata tentang pentingnya kerukunan antaragama.

Perspektif Madjid tentang inklusivisme juga mencakup penerapan konsep ini dalam konteks sosial dan politik. Ia berpendapat bahwa inklusivisme harus tercermin dalam kebijakan publik dan sistem hukum yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan.¹⁰⁷ Madjid menekankan pentingnya

¹⁰⁵Cv Pena Persada, "Inklusivme dan Toleransi Kontekstualisasi Pendidikan agama di Sekolah," n.d.

¹⁰⁶Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1994), 120.

¹⁰⁷Nurcholish Majid, *Islam agama kemanusiaan: membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia* (Yayasan Wakaf Paramadina, 1995).

membangun masyarakat yang inklusif secara sosial dan politik, di mana setiap individu memiliki hak yang dihormati dan diakui, terlepas dari keyakinan agama mereka. Ia percaya bahwa inklusivisme harus menjadi landasan bagi pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan dan harmonis.

Sebagai bagian dari perspektif inklusivisme, Nurcholish Madjid juga memberikan kritik yang tajam terhadap eksklusivisme dan fanatisme agama. Ia menolak pandangan sempit yang menganggap agama mereka sebagai satu-satunya jalan yang benar dan memandang pemeluk agama lain sebagai musuh atau kafir.

Madjid berpendapat bahwa eksklusivisme dan fanatisme agama bertentangan dengan prinsip inklusivisme dan menghasilkan konflik, kebencian, dan ketidakadilan. Ia mendorong pemeluk agama untuk menghindari sikap yang sempit dan intoleran, dan membangun kerukunan dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Perspektif Madjid tentang inklusivisme juga mencakup pemikiran tentang mengatasi misiarisasi dan dominasi agama. Ia menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan menolak upaya untuk memaksakan keyakinan agama pada orang lain. Madjid berpendapat bahwa inklusivisme harus didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati antara agama-agama. Ia mendorong pemeluk agama untuk melihat tugas mereka bukan dalam konteks dominasi, tetapi dalam konteks pengabdian dan pelayanan kepada umat manusia secara luas.¹⁰⁸

¹⁰⁸Maria Ulfa, "Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid" 11, no. 2 (2013).

Perspektif inklusivisme Nurcholish Madjid juga mencakup pemberdayaan perempuan dalam konteks agama. Ia menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan, memberikan kesempatan yang adil dalam berbagai bidang kehidupan, dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan agama dan sosial.¹⁰⁹ Madjid mengkritik interpretasi agama yang membatasi peran perempuan dan memandang mereka sebagai objek atau inferior. Ia mempromosikan kesetaraan gender dalam agama dan mendorong pemeluk agama untuk memahami ajaran agama mereka secara inklusif dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Perspektif inklusivisme Nurcholish Madjid juga relevan dalam konteks multikulturalisme. Madjid mengakui bahwa masyarakat Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis. Ia meyakini bahwa inklusivisme dalam agama dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Dalam perspektif Madjid, inklusivisme mengajak pemeluk agama untuk menghormati dan memahami budaya dan agama lain, serta bekerja sama untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan berkeadilan. Ia mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekayaan.

Perspektif inklusivisme Nurcholish Madjid juga mencakup upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi dalam konteks konflik dan ketegangan antaragama. Ia mendorong pemeluk agama untuk menjadi agen perdamaian dan membangun hubungan yang saling menghormati dengan pemeluk agama lain.

¹⁰⁹Muhammad Zairi Lutfi, "Konsep Inklusivme dalam Pendidikan Islam Perspektif Nurcholush Madjid," Pdf," accessed December 18, 2023.

Madjid mengakui bahwa konflik agama dapat menjadi sumber perpecahan dan kekerasan, tetapi ia percaya bahwa inklusivisme dapat membantu mengatasi konflik ini melalui dialog, pemahaman saling pengertian, dan komitmen terhadap nilai-nilai inklusif. Ia mendorong pemeluk agama untuk memperjuangkan rekonsiliasi, mengembangkan mekanisme dialog dan mediasi.¹¹⁰

Dengan demikian Nurcholish Madjid mengembangkan konsep inklusivisme beragama yang komprehensif dengan menekankan prinsip universalitas nilai-nilai agama. Inti pemikirannya berpusat pada keyakinan bahwa semua agama memiliki tujuan bersama dalam mempromosikan kebaikan universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Madjid menolak pendekatan eksklusif yang mengklaim kebenaran mutlak bagi satu agama, dan sebaliknya mengajak untuk menghargai perbedaan sekaligus menemukan titik temu antar agama. Pemikirannya mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam mewujudkan inklusivisme, terutama terkait pluralitas agama yang berpotensi menimbulkan konflik. Namun, Madjid justru melihat keragaman ini sebagai keniscayaan yang harus disikapi secara positif melalui dialog antaragama yang konstruktif. Dialog menjadi instrumen penting dalam pemikirannya untuk membangun saling pengertian, mengatasi prasangka, dan menciptakan kerjasama antar umat beragama. Pendidikan agama inklusif menjadi pilar penting lainnya dalam pemikiran Madjid. Ia mengkritik sistem pendidikan agama yang dogmatis dan mengusulkan model pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai universal sambil membuka ruang apresiasi

¹¹⁰Zaprul Khan, "Dialog dan Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Perspektif Nurcholish Madjid."

terhadap tradisi agama lain. Madjid juga secara tegas menolak ekstremisme agama yang sempit dan intoleran, seraya menekankan pentingnya memahami agama secara mendalam dan kontekstual. Aspek budaya mendapat perhatian khusus dalam pemikiran Madjid. Ia meyakini bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya tempatnya berkembang, sehingga inklusivisme harus mencakup penghargaan terhadap keragaman budaya. Madjid juga menghubungkan konsep inklusivisme dengan keadilan sosial, menekankan bahwa prinsip inklusif harus terwujud dalam perlakuan yang setara bagi semua anggota masyarakat.

Pemikiran Madjid tentang inklusivisme tidak mengabaikan pentingnya mempertahankan identitas agama. Justru, ia menegaskan bahwa pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama sendiri akan memperkaya dialog antaragama. Peran pemimpin agama dinilai krusial dalam mempromosikan inklusivisme melalui keteladanan dan fasilitasi dialog. Dalam ranah sosial-politik, Madjid menolak formalisasi agama dalam negara dan mendorong kebijakan publik yang menjunjung keadilan dan kesetaraan bagi semua warga. Ia mengkritik keras eksklusivisme dan fanatisme agama yang memicu konflik, serta menolak praktik misiarisasi yang memaksakan keyakinan. Madjid juga memperhatikan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kerangka inklusivisme.

Konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia menjadi latar yang ideal untuk menerapkan pemikiran Madjid. Ia melihat inklusivisme sebagai landasan membangun harmoni sosial, dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menciptakan kehidupan bersama yang adil. Pemikirannya yang holistik ini menawarkan kerangka teoretis dan praktis untuk mengatasi tantangan keragaman

agama di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi bagi upaya perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang pluralistik.

B. Inklusivisme Beragama Perspektif Abdurrahman Wahid

Perspektif inklusivisme beragama Abdurrahman Wahid menekankan keterbukaan dan toleransi terhadap agama-agama lain. Ia meyakini bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan nilai-nilai yang berharga, dan tidak ada satu agama pun yang secara eksklusif memiliki akses penuh terhadap kebenaran mutlak. Wahid mengajak pemeluk agama untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta menjalin dialog yang terbuka dan konstruktif dengan pemeluk agama lain. Wahid percaya bahwa inklusivisme beragama akan memperkuat kerukunan antaragama dan menghindarkan masyarakat dari konflik yang berbasis agama. Ia menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kesetaraan dalam memperlakukan individu tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.¹¹¹

Perspektif Wahid tentang inklusivisme beragama juga mencakup pemahaman bahwa agama adalah sumber keadilan dan kemanusiaan. Ia menganggap agama sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, dan melindungi hak-hak asasi manusia.¹¹² Wahid mendorong pemeluk agama untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari praktek keagamaan mereka.¹¹³

¹¹¹Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 32.

¹¹²Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Gramedia, 1999), 89.

¹¹³Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 112

Bagi Wahid, inklusivisme beragama bukan hanya mengenai toleransi dan dialog antaragama, tetapi juga tentang tindakan nyata dalam mendorong keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung, melawan diskriminasi, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.¹¹⁴

Perspektif Wahid tentang inklusivisme beragama juga mencakup pentingnya dialog antaragama dan dialog antarbudaya. Ia percaya bahwa dialog yang terbuka dan jujur antara pemeluk agama yang berbeda dapat memperkaya pemahaman dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Wahid mendorong pemeluk agama untuk menggali persamaan-persamaan dan memahami perbedaan-perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan.¹¹⁵

Selain dialog antaragama, Wahid juga mendorong dialog antarbudaya. Ia mengakui pentingnya memahami dan menghargai keberagaman budaya sebagai bagian integral dari inklusivisme beragama. Wahid percaya bahwa melalui dialog antarbudaya, masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih dalam, menghormati perbedaan, dan mempromosikan harmoni antara budaya-budaya yang berbeda.¹¹⁶

Perspektif Wahid tentang inklusivisme beragama juga menekankan pentingnya mengakui dan merangkul pluralitas agama. Ia meyakini bahwa pluralitas agama adalah realitas yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Wahid mengajak pemeluk agama untuk menghargai dan memahami keberagaman

¹¹⁴Zulkifli Nelson, "Inklusivisme dan Humanisme Pesantren," 8, no. 2 (2016).

¹¹⁵Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 54.

¹¹⁶Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 45.

agama, serta menghindari sikap eksklusif yang dapat memicu konflik dan ketegangan.¹¹⁷ Wahid menekankan pentingnya melihat pluralitas agama sebagai sumber kekayaan dan kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Ia mempromosikan inklusivisme beragama sebagai cara untuk membangun hubungan harmonis dan saling memperkuat antara pemeluk agama yang berbeda.

Perspektif Wahid tentang inklusivisme beragama juga mencakup pentingnya pendidikan dan literasi agama. Ia mendorong pemeluk agama untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama mereka sendiri, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang agama-agama lain. Wahid berpendapat bahwa dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama-agama lain, pemeluk agama dapat lebih menghargai perbedaan dan membangun dialog yang berarti.¹¹⁸ Wahid juga mendorong pendidikan agama yang inklusif, yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Ia berpendapat bahwa pendidikan agama yang inklusif akan membantu menghasilkan generasi yang lebih terbuka pikirannya dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Inklusivisme beragama perspektif Abdurrahman Wahid juga mencakup pentingnya kesetaraan gender dalam konteks agama. Ia menekankan perlunya mengatasi diskriminasi gender dalam praktik keagamaan dan memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan antara pria dan wanita. Wahid mengkritik interpretasi agama yang mengekang peran perempuan dalam masyarakat dan

¹¹⁷Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 78.

¹¹⁸Abdurrahman Wahid, *Pesantren dan Toleransi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007), 115.

berpendapat bahwa agama harus menjadi sumber pembebasan dan pemberdayaan bagi perempuan.¹¹⁹ Wahid mendorong pemeluk agama untuk memahami nilai-nilai inklusif dan egaliter dalam ajaran agama mereka. Ia mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan agama, serta pemberian ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh.¹²⁰

Wahid meyakini bahwa inklusivisme beragama harus tercermin dalam sistem politik yang demokratis, di mana hak-hak minoritas agama dihormati, dan keragaman agama diakui dan dihargai. Ia menekankan perlunya menjauhkan politik identitas yang eksklusif dan membangun sistem politik yang inklusif bagi semua warga negara.¹²¹ Wahid mendorong pemeluk agama untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, dengan tujuan mempromosikan inklusivisme, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa partisipasi politik yang inklusif dan bertanggung jawab merupakan wujud konkrit dari praktik inklusivisme beragama dalam masyarakat.¹²²

Perspektif Wahid tentang inklusivisme beragama juga mencakup pentingnya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran agama dalam memahami realitas sosial dan perubahan zaman. Ia berpendapat bahwa ajaran agama tidak boleh dianggap sebagai dogma yang kaku, tetapi harus dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan yang beragam. Wahid mendorong pemeluk

¹¹⁹Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: LeKHaS, 2001), 63.

¹²⁰Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 88 (referensi feminis Islam).

¹²¹Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 134.

¹²²Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 156

agama untuk mengembangkan pemahaman yang kritis dan kontekstual terhadap ajaran agama. Ia menekankan perlunya menghindari fundamentalisme dan mengadopsi pendekatan inklusif yang melihat agama sebagai sumber inspirasi dan pedoman untuk mencapai keadilan dan kemanusiaan.¹²³

Ia percaya bahwa dialog yang konstruktif dan saling pengertian antara pemeluk agama yang berbeda dapat memperkuat hubungan antarumat beragama dan membangun kerukunan sosial. Wahid mendorong pemeluk agama untuk terlibat dalam dialog antarumat beragama secara aktif. Ia mempromosikan budaya saling mendengar, menghormati, dan belajar dari pengalaman agama lain, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang agama-agama lain, menghargai perbedaan, dan menciptakan iklim harmoni antarumat beragama.

Wahid berpendapat bahwa eksklusivisme agama, yang menganggap agama sendiri sebagai satu-satunya yang benar, dapat memicu konflik dan intoleransi. Wahid juga menentang fanatisme agama yang membawa pada tindakan kekerasan dan terorisme. Ia berpendapat bahwa agama seharusnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang, bukan alat untuk membenarkan kekerasan atau menjustifikasi penindasan terhadap orang lain.¹²⁴

Wahid berpendapat bahwa agama harus dipahami dalam konteks waktu dan tempat tertentu, serta dalam hubungannya dengan kondisi sosial, politik, dan budaya.¹²⁵ Wahid mendorong pemeluk agama untuk menghindari pemahaman

¹²³Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 2010), 72.

¹²⁴Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom di Media* (Jakarta: LKiS, 2003), 91.

¹²⁵Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God* (Berkeley: University of California Press, 2003), 120

agama yang literal dan dogmatis, serta mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual. Ia menekankan pentingnya melihat agama sebagai sumber nilai-nilai universal yang relevan dalam kehidupan kontemporer, dan untuk memahami bagaimana ajaran agama dapat diaplikasikan secara konstruktif dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman.

C. Persamaan Inklusivisme Beragama Perpektif Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

1.1 Persamaan Inklusivisme Beragama Perpektif Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

No	Aspek	Nurcolish Madjid	Abdurrahman Wahid
1	Dialog Antaragama	Percaya dialog antaragama penting untuk membangun pemahaman dan harmoni sosial.	Juga mendukung dialog antaragama sebagai alat memperkuat kesatuan nasional.
2	Konteks Sejarah dan Sosial	Menekankan dialog dalam konteks pluralisme modern (misal: buku "Islam Doktrin dan Peradaban").	Mendorong dialog antaragama melalui pidato dan tulisan untuk memperkuat harmoni sosial.
3	Pemahaman dan Kesadaran	Dialog sebagai jembatan mengatasi kesalahpahaman antaragama.	Mengedepankan pendekatan dialogis untuk kerukunan umat beragama.
4	Fokus pada Kesamaan	Menekankan nilai universal (kasih sayang, keadilan, toleransi) dalam semua agama.	Mempromosikan kesamaan nilai lintas agama melalui organisasi seperti NU.
5	Implementasi dan Praktik	Mengimplementasikan visi melalui forum	Mewujudkan inklusivisme lewat

		akademis dan organisasi masyarakat sipil	kepemimpinan politik (sebagai presiden) dan pendirian organisasi.
6	Nilai Universal	Menyoroti prinsip universal Islam (keadilan, kasih sayang) yang relevan lintas agama.	Menekankan esensi universal agama dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni.
7	Toleransi	Toleransi dan saling pengertian sebagai dasar keadilan sosial.	Memandang toleransi sebagai prinsip moral wajib di masyarakat plural.
8	Penerapan Sosial dan Politik	Nilai universal sebagai dasar kebijakan inklusif (misal: keadilan sosial).	Menerapkan kebijakan nasional berbasis keadilan dan keberagaman.
9	Konsep Tajdid (Pembaruan)	Mendukung pembaruan Islam agar relevan dengan zaman.	Mengimplementasikan tajdid lewat pendekatan dialogis dan inklusif dalam politik.
10	Kritik ortodoksi	Mengkritik penafsiran ortodoks yang sempit sebagai penghambat inklusivisme.	Menawarkan tafsir inklusif melalui kebijakan progresif.
11	Toleransi dan Keragaman	Menekankan toleransi bukan sekadar retorika, tapi prinsip dasar harmoni sosial.	Menghargai keragaman sebagai pilar utama persatuan Indonesia.

Tabel 1.1 menyajikan berbagai persamaan mengenai inklusivisme

beragama perpektif Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Persamaan tersebut mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

1. Dialog Antaragama

Salah satu persamaan signifikan antara Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid adalah keyakinan mendalam mereka akan pentingnya dialog

antaragama sebagai instrumen penting dalam membangun pemahaman dan harmoni di tengah masyarakat yang pluralistic.¹²⁶

2. Konteks Sejarah dan Sosial

Madjid dan Wahid hidup dalam era yang sama di mana globalisasi dan pluralisme semakin mempengaruhi dinamika sosial dan politik Indonesia.¹²⁷ Sebagai contoh, Nurcholish Madjid dalam karyanya yang berjudul "Islam Doktrin dan Peradaban" menekankan pentingnya dialog antaragama dalam konteks pluralisme modern. Sementara itu, dalam banyak pidato dan tulisannya, Gusdur juga mengadvokasi dialog antaragama sebagai cara untuk memperkuat kesatuan dan harmoni nasional.

3. Konsep Pemahaman dan Kesadaran

Keduanya percaya bahwa dialog antaragama bisa menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama dan kesadaran kolektif. Madjid, dalam banyak wawancara dan diskusinya, sering kali menekankan bahwa dialog adalah jembatan untuk mengatasi kesalahpahaman dan ketegangan antaragama.¹²⁸ Gusdur, melalui kebijakan dan inisiatifnya, juga mengedepankan pendekatan dialogis dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

4. Fokus pada Kesamaan

Keduanya menitikberatkan pada kesamaan nilai dan prinsip universal yang dianut oleh berbagai tradisi keagamaan. Dalam banyak kesempatan, Madjid menekankan bahwa nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi

¹²⁶Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography* (Jakarta: Equinox, 2002), 178

¹²⁷Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 89

¹²⁸Robert W. Hefner, "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia," in *Civil Islam* (Princeton University Press, 2011), <https://doi.org/10.1515/9781400823871>.

ditemukan di seluruh tradisi keagamaan dan harus dihargai. Gusdur, dengan latar belakangnya yang inklusif, juga mempromosikan ide-ide serupa melalui organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama.

5. Implementasi dalam Praktik

Keduanya tidak hanya berbicara tetapi juga mengimplementasikan visi mereka dalam praktik. Madjid melalui forum akademis dan organisasi masyarakat sipil yang ia dirikan, sementara Gusdur melalui kepemimpinannya sebagai Presiden dan melalui pendirian berbagai organisasi yang mempromosikan dialog antaragama.¹²⁹

6. Penafsiran Nilai Universal

Nurcholish Madjid dan Wahid sepakat bahwa ada nilai-nilai universal yang bersifat lintas agama dan budaya. Madjid, dalam karyanya, sering menekankan pentingnya melihat ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas, mengakui prinsip-prinsip universal seperti kasih sayang dan keadilan.¹³⁰ Sementara itu, Gusdur dalam banyak pidatonya menyoroti esensi universal dari ajaran agama dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni.¹³¹

7. Toleransi sebagai Manifestasi Nilai Universal

Keduanya juga mengedepankan toleransi sebagai manifestasi dari pengakuan nilai-nilai universal tersebut. Madjid sering berbicara tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian antara umat beragama untuk

¹²⁹Barton, *Abdurrahman Wahid*.

¹³⁰Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994), 67.

¹³¹Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 33.

mewujudkan keadilan sosial.¹³² Gusdur, dengan latar belakang politik dan keagamaannya, memandang toleransi sebagai prinsip moral yang harus ditegakkan dalam masyarakat plural.

8. Penerapan dalam Konteks Sosial dan Politik

Dalam konteks sosial dan politik, keduanya melihat nilai-nilai universal ini sebagai dasar untuk kebijakan yang inklusif. Gusdur, misalnya, dalam kapasitasnya sebagai presiden, sering kali menekankan pentingnya keadilan dan keberagaman dalam kebijakan nasional.¹³³

9. Konsep Pembaruan (Tajdid) dalam Islam

Keduanya merujuk pada konsep tajdid atau pembaruan dalam Islam. Madjid mengemukakan perlunya tajdid yang berkelanjutan agar Islam tetap relevan.¹³⁴ Sebaliknya, Gusdur mengimplementasikan tajdid melalui pendekatan dialogis dan inklusif dalam politik dan masyarakat.¹³⁵

10. Kritik Terhadap Ortodoksi

Keduanya mengkritik interpretasi ortodoks dari ajaran Islam yang sempit. Madjid, seperti yang dijelaskan dalam karya-karyanya, menyoroti bagaimana interpretasi yang kaku dapat menghambat inklusivisme.¹³⁶ Gusdur menawarkan interpretasi yang lebih inklusif melalui praktek dan kebijakan yang progresif.¹³⁷

¹³²Nurcholish Majid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Mizan Pustaka, 2008).

¹³³Zainal Abidin Bagir, *Tantangan Pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: CRCs UGM, 2005), 78.

¹³⁴Nurcholish Majid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: Paramadina, 1987), 91.

¹³⁵Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

¹³⁶Nurcholish Majid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), 120.

¹³⁷Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 88.

11. Toleransi dan Keragaman

Dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid (Gusdur), konsep toleransi dan penghargaan terhadap keragaman tidak sekadar sebagai retorika tetapi sebagai prinsip yang mendasari harmoni sosial di Indonesia. Keduanya menekankan bahwa Indonesia, dengan keragaman etnis dan agama, memerlukan pendekatan inklusif.¹³⁸

D. Perbedaan Perpektif Inklusivisme Beragama Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Meskipun Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid keduanya dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan inklusivisme beragama, pendekatan dan fokus keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Berikut beberapa perbedaan signifikan dalam perspektif inklusivisme beragama mereka:

1.1 Perbedaan Perpektif Inklusivisme Beragama Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

No	Aspek	Nurcolish Madjid	Abdurrahman Wahid
1	Metologi Pendekatan	- Menggunakan eksegesis mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan hadis. - Memadukan filsafat Barat (eksistensialisme, pluralisme) dengan teologi Islam. - Pendekatan interdisipliner (sosial, humaniora, agama).	- Berfokus pada pengalaman politik dan sosial. - Mengutamakan dialog langsung dengan komunitas agama. - Penyampaian pesan melalui pidato, media, dan forum publik. - Menyesuaikan inklusivisme dengan konteks sosio-politik Indonesia.

¹³⁸ Abdurrahman Wahid, *Pesantren dan Toleransi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007), 55.

		- Karya berbasis riset (buku, jurnal akademis).	
2	Fokus Topik	- Menekankan evolusi Islam dalam era modern. - Dekonstruksi hubungan agama-negara (netralitas negara). - Reformasi pendidikan keagamaan untuk responsif terhadap zaman.	- Dialog antaragama sebagai alat utama harmoni sosial. - Islam inklusif yang hidup berdampingan dengan agama lain. - Menerapkan inklusivisme dalam kebijakan politik (misal: perlindungan minoritas).
3	Interpretasi Tekstual	- Tafsir multidisipliner (linguistik, sejarah, konteks). - Pendekatan kritis terhadap teks suci dengan analisis konteks asbabun nuzul.	- Penekanan pada relevansi teks dengan kondisi aktual. - Interpretasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pluralistik.
4	Medium Penyampaian	- Artikel jurnal, buku (contoh: "<i>Islam Doktrin dan Peradaban</i>"). - Diskusi di lingkaran intelektual.	- Pidato, wawancara media, ceramah populer. - Aksi nyata melalui kebijakan politik dan organisasi masyarakat (NU).
5	Peran Sosial-Politik	- Berpengaruh melalui gagasan dan tulisan. - Kurang terlibat langsung dalam politik praktis.	- Implementasi ide inklusif lewat jabatan politik (Presiden RI). Pendekatan <i>grassroots</i> melalui NU dan LSM.

Tabel 1.1 di atas, menyebutkan beberapa perbedaan pandangan antara

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai inklusivisme beragama.

Secara rincinya disajikan pada uraian berikut:

1. Metodologi Pendekatan

a. Nurcholish Madjid, Pendekatan Akademis dan Filosofis yang Mendalam

Nurcholish Madjid dalam pendekatannya terhadap inklusivisme beragama, menerapkan metode eksegesis yang mendalam pada teks-teks suci Islam. Ia melakukan kajian komprehensif yang mencakup konteks historis, linguistik, dan teologis dari ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis.¹³⁹ Madjid memadukan pemikiran Islam dengan filosofi Barat, seperti eksistensialisme dan pluralisme, untuk menemukan titik temu antara tradisi-tradisi beragama. Pendekatannya ini seringkali menghasilkan sintesis yang unik antara teologi Islam dan pemikiran Barat kontemporer. Pendekatan Madjid tidak hanya terbatas pada studi keagamaan; ia memanfaatkan pendekatan interdisipliner yang mencakup ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan agama. Hal ini memungkinkannya untuk mengeksplorasi inklusivisme dari berbagai dimensi.

Madjid secara aktif menerbitkan karya-karya akademis, termasuk artikel jurnal, makalah konferensi, dan buku, yang menunjukkan dedikasinya terhadap pendekatan akademis dalam memahami dan mengembangkan konsep inklusivisme beragama.

b. Abdurrahman Wahid, Pendekatan Praktis dan Kontekstual

Abdurrahman Wahid dengan latar belakangnya sebagai seorang politisi dan aktivis sosial, seringkali menggabungkan pengalaman praktisnya dalam dunia politik dengan pemikirannya tentang inklusivisme beragama. Ia menerapkan pengalaman pribadi dan politik sebagai dasar untuk merumuskan strategi

¹³⁹Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 45-50.

inklusivitasnya. Wahid dikenal aktif dalam menginisiasi dialog antarumat beragama di Indonesia. Pendekatannya lebih praktis, fokus pada interaksi langsung dengan komunitas-komunitas keagamaan untuk membangun pemahaman bersama dan toleransi.

Selain melalui karya tulis, Wahid sering menggunakan platform komunikasi publik seperti pidato, wawancara televisi, dan forum publik untuk menyampaikan pesan inklusivitasnya. Ini memungkinkannya untuk mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik.¹⁴⁰ Wahid selalu mempertimbangkan konteks sosio-politik Indonesia dalam setiap inisiatif dan pernyataannya mengenai inklusivisme. Ia memahami bahwa konteks lokal memainkan peran krusial dalam penerapan prinsip inklusivitas.¹⁴¹

2. Fokus Topik

a. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid sering kali menekankan bahwa Islam perlu berevolusi dalam konteks modernitas. Madjid menguraikan bagaimana pemahaman Islam harus disesuaikan dengan era modern tanpa mengorbankan esensi ajarannya.

Dalam pemikirannya, Madjid mempertanyakan dan mendekonstruksi hubungan tradisional antara agama, khususnya Islam, dengan negara. Ia berargumen bahwa dalam konteks Indonesia yang pluralistik, negara harus mampu menjaga netralitas dan keadilan bagi semua warga, tanpa mendiskriminasi berdasarkan agama.

¹⁴⁰Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 2010), 88.

¹⁴¹Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography* (Jakarta: Equinox, 2002), 210

Madjid melihat pentingnya mereformasi pendidikan keagamaan agar lebih reflektif terhadap tantangan zaman. Ia berpendapat bahwa pendidikan keagamaan harus mempromosikan pemahaman yang inklusif, mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan politik.¹⁴²

b. Abdurrahman Wahid

Wahid dengan visinya yang inklusif, memandang dialog antaragama sebagai salah satu instrumen kunci untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antarumat beragama. Wahid memandang Islam sebagai agama yang inklusif dan menekankan keharmonisan antara Islam dan tradisi-tradisi keagamaan lain di Indonesia. Wahid mengeksplorasi konsep-konsep keagamaan dan bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang *pluralistic*.¹⁴³

Sebagai seorang politisi, Wahid memadukan pemikiran inklusifnya ke dalam arena politik. Wahid berupaya menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas dalam kebijakan politiknya, termasuk dalam konteks hubungan antara agama dan negara.¹⁴⁴

3. Interpretasi Tekstual

a. Nurcholish Madjid

Madjid seringkali menerapkan metode tafsir yang multi-disipliner, yang melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek linguistik, sejarah, dan kontekstual

¹⁴²Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: Paramadina, 1987), 112.

¹⁴³Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Gramedia, 1999), 67.

¹⁴⁴Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 155

dari teks Al-Qur'an. Madjid secara konsisten menggunakan pendekatan historis-kritis untuk memahami konteks asal dari setiap ayat atau hadis.¹⁴⁵

b. Abdurrahman Wahid

Wahid dikenal karena kemampuannya untuk memberikan interpretasi yang kontekstual dan relevan terhadap teks-teks keagamaan. Wahid sering kali menyampaikan pandangan inklusif melalui karyanya, dan untuk memahami ini dengan lebih baik.¹⁴⁶

E. Analisis Historis-Sosiologis Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

Dalam penelitian tentang pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, penulis menemukan perbandingan yang kompleks mengenai pandangan mereka terhadap inklusivisme beragama. Fokus khusus pada dimensi historis dan sosiologis memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana keduanya memandang dan menginterpretasikan konsep inklusivisme dalam konteks budaya, sosial, dan sejarah yang berbeda.

Dalam menganalisis perbedaan dan persamaan mereka, kita dapat melihat bagaimana pendekatan historis mempengaruhi interpretasi teologis dan bagaimana konteks sosial mendorong penerapan inklusivisme dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman hidup mereka, kita dapat merangkai narasi yang lebih mendalam tentang bagaimana visi inklusif mereka membentuk dialog antaragama, respons terhadap pluralisme,

¹⁴⁵Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994), 90.

¹⁴⁶Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 33.

dan upaya mereka dalam mempromosikan perdamaian serta harmoni antar umat beragama di Indonesia.

1. Historis-Sosiologis Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (1939–2005) muncul sebagai salah satu tokoh pembaru pemikiran Islam Indonesia dalam konteks sejarah yang kompleks, mencakup periode pra-kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Pemikirannya tidak dapat dipahami tanpa menelusuri akar-akar historis yang membentuknya, mulai dari tradisi pesantren, pengaruh gerakan pembaruan Islam global, hingga interaksinya dengan modernitas Barat. Madjid memulai pendidikannya di Pesantren Darussalam Gontor, sebuah institusi yang terkenal dengan kurikulum integratif antara ilmu agama dan umum.¹⁴⁷ Gontor, di bawah asuhan K.H. Imam Zarkasyi, menerapkan sistem pendidikan modern yang mengombinasikan metode pembelajaran klasik (seperti sorogan dan bandongan) dengan pendekatan kritis terhadap teks-teks keagamaan. Di sinilah Madjid pertama kali terpapar dengan pemikiran pembaruan Islam, terutama melalui karya-karya Muhammad Abduh dan Rashid Rida yang menjadi bacaan wajib di pesantren tersebut.¹⁴⁸

Namun, berbeda dengan banyak alumni pesantren yang cenderung konservatif, Madjid mengembangkan kecenderungan intelektual yang lebih terbuka. Ia mulai mempertanyakan doktrin-doktrin Islam yang dianggapnya terlalu tekstualis dan kurang relevan dengan tantangan zaman. Sikap kritis ini kelak

¹⁴⁷Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982)

¹⁴⁸Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997)

menjadi ciri khas pemikirannya, terutama dalam menanggapi isu-isu seperti sekularisasi, pluralisme, dan demokrasi.

Pada tahun 1978, Madjid melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Chicago di bawah bimbingan Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim modernis asal Pakistan yang dikenal dengan metode "gerakan ganda" (double movement) dalam penafsiran Al-Qur'an.¹⁴⁹ Rahman menekankan pentingnya memahami wahyu dalam konteks historisnya sebelum menerapkannya ke dalam konteks kekinian. Pendekatan ini sangat memengaruhi Madjid dalam mengembangkan metodologi penafsirannya sendiri, yang menekankan kontekstualisasi daripada literalisasi teks-teks agama.

Di Chicago, Madjid juga terpapar dengan pemikiran filsafat Barat, khususnya modernisme dan postmodernisme, yang memberinya perspektif baru dalam melihat hubungan antara agama dan modernitas.¹⁵⁰ Ia mulai mempertanyakan mengapa dunia Islam tertinggal dalam perkembangan sains dan demokrasi, sementara Barat mampu mencapai kemajuan pesat. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorongnya untuk merumuskan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang lebih progresif.

Pemikiran Madjid tidak dapat dipisahkan dari konteks politik Indonesia pada masa Orde Baru (1966–1998), di mana negara bersikap represif terhadap gerakan-gerakan Islam politik. Pada awal 1970-an, ketika rezim Soeharto memberangus partai-partai Islam dan memaksa fusi mereka ke dalam Partai

¹⁴⁹Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

¹⁵⁰Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Antara, 1999.

Persatuan Pembangunan (PPP), Madjid muncul dengan gagasan kontroversial: "Islam Yes, Partai Islam No".¹⁵¹ Gagasan ini merupakan kritik terhadap politisasi agama yang dianggapnya telah menyebabkan stagnasi pemikiran Islam. Madjid berargumen bahwa Islam tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat politik, karena hal itu justru akan mengerdilkan nilai-nilai universalnya. Sebaliknya, umat Islam harus fokus pada pembaruan pemikiran dan penguatan civil society agar bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa.¹⁵² Pernyataan Madjid ini memicu perdebatan sengit di kalangan intelektual Muslim. Kelompok tradisional dan fundamentalis menuduhnya sebagai "sekularis", sementara kalangan modernis melihatnya sebagai upaya untuk menyelamatkan Islam dari eksploitasi politik.¹⁵³ Namun, dalam konteks historis, gagasan ini justru menjadi fondasi bagi perkembangan Islam moderat di Indonesia yang lebih berorientasi pada etika sosial daripada kekuasaan formal.

Madjid juga banyak dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam global, terutama Modernisme Islam yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Ia melihat bahwa dunia Islam sedang mengalami krisis epistemologis, di mana umat Muslim terjebak dalam taqlid (peniruan buta) terhadap tradisi masa lalu tanpa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.¹⁵⁴

¹⁵¹Robert W. Hefner *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000).

¹⁵²Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987)

¹⁵³Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986)

¹⁵⁴Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)

Untuk mengatasi hal ini, Madjid mengusulkan reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin Islam dengan pendekatan yang lebih historis-kritis. Misalnya, dalam menanggapi isu demokrasi, ia berargumen bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi selama nilai-nilai keadilan dan musyawarah dijunjung tinggi.¹⁵⁵ Demikian pula, dalam isu pluralisme, Madjid menekankan bahwa Islam mengakui keberagaman sebagai *sunnatullah* (hukum alam) yang harus dihormati.

Pada masa Reformasi 1998, pemikiran Madjid semakin mendapatkan tempat dalam wacana publik. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendorong transisi demokrasi dan menentang otoritarianisme Orde Baru. Gagasannya tentang masyarakat madani (*civil society*) yang berbasis pada nilai-nilai keislaman tetapi inklusif terhadap perbedaan, menjadi acuan bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia.¹⁵⁶ Namun, Madjid juga menghadapi tantangan baru dari kelompok-kelompok Islam konservatif yang semakin menguat pasca-Reformasi. Kritik terhadap pemikirannya tentang pluralisme agama dan sekularisasi terus bermunculan, terutama dari kalangan yang menginginkan formalisasi syariat Islam dalam negara.¹⁵⁷ Meskipun demikian, warisan pemikiran Madjid tetap bertahan sebagai salah satu arus utama dalam perkembangan Islam moderat di Indonesia.

Perjalanan intelektual Nurcholish Madjid dapat dipahami melalui konteks historis yang melingkupi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Pada fase awal (1960-1970), pemikiran Madjid banyak dipengaruhi oleh kegagalan partai-

¹⁵⁵Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992)

¹⁵⁶Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000)

¹⁵⁷Luthfi Assyaukanie, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2009)

partai Islam dalam pemilu 1955 dan represi Orde Baru terhadap politik Islam. Artikel kontroversialnya "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" (1970) menjadi tonggak penting yang memicu perdebatan luas tentang masa depan Islam di Indonesia. Pada periode ini, Madjid mulai mengembangkan kritik tajam terhadap formalisme Islam yang terlihat dalam gerakan-gerakan Islam politik, sekaligus menyerap pemikiran Harun Nasution tentang "Islam Rasional".¹⁵⁸

Secara historis, pemikiran Nurcholish Madjid telah melewati tiga tahap transformasi besar: dari tradisionisme pesantren menuju modernisme kritis, dari wacana keagamaan sempit menuju pemikiran yang terbuka, serta dari konsep keislaman yang eksklusif menuju visi yang inklusif¹⁵⁹.

Perjalanan intelektualnya mencerminkan dinamika pemikiran Islam Indonesia abad ke-20 yang berusaha merespons tantangan modernitas, tekanan politik otoriter, dan tuntutan masyarakat yang semakin plural.¹⁶⁰ Warisan pemikirannya tetap relevan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti radikalisme agama, politik identitas, krisis moral dalam demokrasi, serta pergumulan antara agama dan sains.¹⁶¹ Madjid telah meletakkan dasar bagi perkembangan pemikiran Islam yang substantif, kontekstual, dan rahmatan lil 'alamin di Indonesia.

¹⁵⁸Nurcholish Madjid, *"Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat."* *Panji Masyarakat*, No. 22, 1970, 12-15.

¹⁵⁹Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 199), 156.

¹⁶⁰Fachry Ali, Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), 189.

¹⁶¹Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 112.

2. Historis-Sosiologis Abdurrahman Wahid

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terbentuk melalui proses historis yang kompleks dan multi-dimensional. Lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur mewarisi tradisi intelektual yang kaya sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari dan anak dari Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia.¹⁶²

Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan pesantren yang ketat, dimulai dari Pendidikan di Pesantren Tebuireng (1949-1953) dan Pesantren Krapyak (1954-1957), di mana ia mendalami kitab-kitab kuning klasik seperti *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali dan *Fath al-Qarib* dalam mazhab Syafi'i.¹⁶³ Namun, berbeda dengan kebanyakan santri tradisional, Gus Dur menunjukkan minat yang luas terhadap pengetahuan umum, termasuk sastra Barat dan filsafat.

Periode penting dalam perkembangan intelektual Gus Dur terjadi ketika ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo (1964-1966) dan kemudian Universitas Baghdad (1966-1970). Di Timur Tengah inilah pemikirannya mengalami transformasi radikal.¹⁶⁴ Di Baghdad khususnya, ia tidak hanya mempelajari teologi Islam tetapi juga menyaksikan langsung gejolak politik Arab modern, termasuk pengaruh nasionalisme Arab dan sosialisme Ba'ath. Pengalaman ini membentuk perspektif kritisnya tentang hubungan Islam dan negara, serta mengembangkan apresiasi mendalam terhadap pluralisme budaya. Uniknya, Gus

¹⁶²Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Equinox, 2002), 23-45.

¹⁶³Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 167-189.

¹⁶⁴Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 78-92.

Dur justru banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan-perpustakaan Baghdad untuk mempelajari karya-karya filsuf Barat seperti Jean-Paul Sartre dan Karl Marx, sambil tetap mendalami tradisi tasawuf Ibnu Arabi.¹⁶⁵

Ketika kembali ke Indonesia tahun 1971, Gus Dur menghadapi situasi politik yang kompleks di bawah rezim Orde Baru yang sedang melakukan konsolidasi kekuasaan dengan meminggirkan politik Islam.¹⁶⁶ Pada periode 1970-1980an inilah ia mulai merumuskan pemikiran khasnya yang revolusioner dalam konteks Indonesia saat itu. Konsep "Pribumisasi Islam" yang dikembangkannya merupakan respons terhadap dua kecenderungan ekstrem: Arabisasi Islam yang menolak budaya lokal dan sekularisasi radikal yang meminggirkan agama dari ruang publik.¹⁶⁷ Dalam berbagai tulisannya di majalah Prisma dan Kompas, Gus Dur dengan lantang menolak formalisasi syariah dalam politik, yang ia anggap akan merusak substensi nilai-nilai Islam itu sendiri.

Puncak pengaruh intelektual Gus Dur terjadi ketika terpilih sebagai Ketua Umum NU tahun 1984. Di bawah kepemimpinannya, NU melakukan transformasi organisasi yang dramatis. Deklarasi "Kembali ke Khittah 1926" bukan sekadar retorika, tetapi upaya sistematis untuk memisahkan NU dari politik praktis dan mengembalikannya pada peran sosial-keagamaan. Pada saat yang sama, Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi tahun 1991 sebagai wadah kritik terhadap otoritarianisme Orde Baru, yang menarik berbagai intelektual dari berbagai latar

¹⁶⁵Luthfi Assyauckanie, *Islam and the Secular State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009), 134-156.

¹⁶⁶R. William Liddle, *Leadership and Culture in Indonesian Politics* (Sydney: Allen & Unwin, 1996), 98-125.

¹⁶⁷Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 145-178.

belakang agama dan ideologi.¹⁶⁸ Jaringan intelektual yang dibangunnya meliputi tidak hanya kalangan pesantren tetapi juga aktivis HAM, seniman, dan tokoh-tokoh minoritas.

Dari perspektif sosiologis, pemikiran Gus Dur dapat dipahami sebagai respons terhadap transformasi struktural masyarakat Indonesia yang mengalami modernisasi cepat di bawah Orde Baru. Sebagai produk sistem pesantren yang kemudian terpapar pemikiran global, Gus Dur merepresentasikan fenomena sosial baru - munculnya kelas menengah Muslim terdidik yang mencari sintesis antara tradisi keislaman dan tuntutan modernitas.

Basis sosial utama Gus Dur terletak pada jaringan pesantren NU di Jawa Timur, yang memberinya modal sosial (social capital) yang sangat besar. Menurut penelitian Feillard (1999), jaringan kyai di Jawa Timur membentuk semacam "aristokrasi agama" yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat pedesaan. Gus Dur dengan cerdas memanfaatkan jaringan ini sambil mentransformasikannya melalui modernisasi sistem pendidikan pesantren.¹⁶⁹ Ia mendorong pengajaran ilmu-ilmu umum di pesantren dan mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama sebagai upaya sistematis untuk menciptakan generasi baru Muslim yang melek modernitas tetapi tetap berakar pada tradisi.¹⁷⁰

Secara sosiologis, konsep "Masyarakat Madani" yang digagas Gus Dur merupakan upaya untuk membangun ruang publik yang inklusif di tengah

¹⁶⁸Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam* (Jakarta: LSAF, 2010), 189-215.

¹⁶⁹Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 189-203.

¹⁷⁰Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 112-134.

masyarakat Indonesia yang plural. Berbeda dengan kalangan Islamis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, Gus Dur memandang civil society sebagai arena di mana berbagai kelompok bisa berinteraksi setara. Pendirian berbagai LSM di bawah payung NU seperti LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) dan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) merupakan institusionalisasi dari visi ini.¹⁷¹ Yang menarik secara sosiologis adalah cara Gus Dur membangun aliansi dengan kelompok-kelompok marginal. Pembelaannya terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan komunitas Kristen di Indonesia Timur bukan hanya berdasar prinsip teologis, tetapi juga strategi politik untuk membangun koalisi sosial yang luas¹⁷². Pendekatan ini menuai kritik tajam dari kalangan Islam konservatif tetapi berhasil memperluas basis dukungan NU di luar tradisionalnya.

Warisan sosiologis pemikiran Gus Dur yang paling abadi adalah transformasi NU dari organisasi keagamaan tradisional menjadi kekuatan sosial-politik modern. Generasi penerusnya seperti Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siraj melanjutkan tradisi pemikiran kritis ini sambil menyesuaikan dengan tantangan kontemporer¹⁷³. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, pemikiran Gus Dur tentang demokrasi substantif dan pluralisme agama tetap relevan sebagai alternatif terhadap bangkitnya konservatisme agama dan politik identitas.

¹⁷¹Yenny Wahid, ed., *Gus Dur dan Pluralisme: Warisan Pemikiran untuk Indonesia Multikultural* (Jakarta: The Wahid Foundation, 2015), 78-89.

¹⁷²PPIM UIN Jakarta, *Survei Nasional Pemikiran Keagamaan Generasi Muda NU* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, 2021), 23.

¹⁷³Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 201-223.